



Dr Junaidi Sag Mhum Mkom
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom

SIAPA sebenarnya yang menciptakan istilah politik identitas itu pertama kali masih 'abu-abu' sampai hari ini. Secara substantif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. L.A. Kauffman dalam "The Anti-Politics of Identity," yang

Kebangkitan Politik Identitas: Antara Teori dan Praksis

pertama kali menjelaskan hakikat politik identitas dengan melacak asal-muasalnya pada gerakan mahasiswa anti-kekerasan yang dikenal dengan SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Committee), yaitu sebuah organisasi gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal 1960-an.

Dalam pandangan Amy Gutmann, politik identitas sangat jelas terlihat pada gerakan Martin Luther King dan uskup-uskup Katolik di Amerika. Secara substantif lebih didorong oleh argumen keadilan sosial, bukan karena alasan agama. Dalam perspektif ini, sekali lagi, karena mengalami perlakuan yang tidak adil dan ingin berlakunya prinsip persamaan (equality) dalam masyarakat luas. Bagi Gutmann ada tiga pencapaian dalam membicarakan politik identitas yaitu kesetaraan sipil, kebebasan individu, dan kesetaraan kesempatan dalam teori keadilan berdemokrasi.

Dalam perkembangannya gagasan tentang politik identitas telah menjadi topik kajian di kalangan para ilmuwan dengan membingkainya dalam teori-teori sosial yang beragam. Sikap pro dan kontra di

kalangan ilmuwan pun telah semakin merangsang orang untuk mengenal lebih jauh apa hakekat politik identitas itu. Politik identitas menjadi isu yang hangat dan mudah "digoreng" oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab karena ada keyakinan bahwa cara termudah dan paling efektif menarik hati orang untuk memilih seorang kandidat adalah dengan cara membangkitkan ikatan emosional pemilih pada calon yang diinginkan terutama dalam penyelenggaraan pemilu. Kasus yang viral dan miris adalah sebagaimana yang terjadi di Jakarta dalam Pilkada 2017.

Di sisi lain politik identitas dapat kita kupas dalam perspektif teori konstruktivisme dari Pierre Van Den Bergh (1991) yang berpendapat bahwa politik identitas baik etnik maupun agama sengaja dikonstruksi oleh elit politik untuk mendapatkan kekuasaan secara mudah dengan ongkos politik yang rendah. Politik identitas dalam perspektif agama terjadi melalui upaya pembangunan citra diri dan menegaskan harga diri sebagai yang "terhina" sehingga berdampak dalam publik memunculkan simpati dan empati. Kondisi

ini dihadirkan untuk membangun psikologis sebagai mayoritas yang "terluka" sekaligus ruang untuk membangun batas kuasa mayoritas kepada mereka yang dipandang minoritas demi mempertahankan demarkasi kekuasaan dan kepentingan elit politik dengan mengatasnamakan agama dan sebagainya.

Dalam perspektif ilmu sosiologi, konsep identitas dipandang sebagai struktur keanggotaan individu dalam kelompok tertentu, seperti ciri, kategori dan peranan sosial. Seseorang yang memiliki identitas yang sama mempunyai persamaan kebudayaan seperti agama, bahasa, organisasi politik dan sosial serta tumbuh perasaan dan kesadaran tentang "kekitaan" mereka.

Politik identitas menurut pemikir Hogg dan Abrams (1988) adalah konsep masyarakat tentang siapa dan seperti apa mereka, serta bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Menurut mereka masyarakat terstruktur secara hirarkis ke dalam kategori-kategori sosial dalam penggolongan individu menurut ras, negara, kelas sosial, jenis kelamin,

pekerjaan, etnis, agama dan lain sebagainya.

Kategori dan indikator tersebut terdapat suatu kekuatan, status dan martabat yang memunculkan suatu struktur sosial yang spesifik dalam masyarakat dan menentukan kekuatan serta status hubungan antar individu dan antar kelompok.

Agaknya menarik gagasan dan pemikiran dari Manuel Castells (2010), dalam karyanya "The Power of Identity". Bagi Castells identitas adalah sumber makna diri yang muncul dan diberikan oleh seorang individu terhadap dirinya sendiri, atau dari sekelompok orang terhadap kelompok mereka sendiri yang dibangun melalui proses individualisasi. Identitas terbentuk jika ia diinternalisasi oleh masyarakat di luar dirinya. Castells membagi identitas ke dalam tiga kategori, yaitu legitimate identity, resistance identity dan project identity.

Legitimate identity digunakan dalam proses mengenalkan institusi dominan untuk memperluas dan merasionalisasi dominasi mereka terhadap pelaku sosial.



Resistance identity sebuah identitas yang dipertahankan dengan melakukan perlawanan untuk mempertahankan identitas dari stigma pihak yang melakukan dominasi. Sedangkan project identity merupakan tindakan pelaku sosial yang merekonstruksi suatu identitas baru yang bertujuan mendefinisikan kembali posisi mereka dalam masyarakat dengan berusaha bertransformasi dari struktur sosial secara menyeluruh.

Secara komprehensif dan sederhana bahwa konsep identitas melahirkan tindakan yang membedakan individu atau suatu kelompok tertentu dengan individu atau kelompok lain dan dilakukan secara kontiniu dalam hubungan interaksi sosial sehingga memunculkan opini yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut. Kondisi ini akhirnya membuat kemajemukan dan pluralitas tidak lagi sebagai ikatan dalam persatuan dan kesatuan. Semoga!

Bacaleg, 2 BPKal Akan Undur Diri

WATES (KR) - Dua anggota Badan Penyelawaran Kalurahan (BPKal) di Kabupaten Kulonprogo akan mengundurkan diri dari jabatannya. Menyusul mereka mengajukan sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).

Hal itu dibenarkan oleh Risdiyanto Ahli Muda Bidang Pembicaraan dan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKaldaldu dan KB) Kabupaten Kulonprogo.

"Bila ada lurah atau anggota BPKal yang mengundurkan diri untuk maju bacaleg, maka mereka diberhentikan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati. Hingga saat ini, belum ada lurah yang mundur. Tetapi ada 2 BPKal yang akan mundur, dari Kalurahan Karang Sari (Pengasih) dan Kalurahan Jatimulyo (Girimulyo)," ungkap Risdiyanto.

Terkait pamong kalurahan atau perangkat desa yang akan nyaleg, dan mundur, maka diberhentikan dengan SK Lurah. "Sampai saat ini, kami belum menerima laporan pamong kalurahan yang mundur

untuk nyaleg," kata Risdiyanto.

Terkait hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo menggelar rapat koordinasi (rakor) mengundang instansi terkait seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Dalam rakor tersebut, kami berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi masalah seperti yang terindikasi mantan terpidana maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa dan perangkat desa yang mundur karena maju bacaleg," ucap Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, KPU Kulon Progo, Tri Mulatsih Spd MA, Jumat (26/5).

KPU Kulonprogo, lanjut Tri Mulatsih, belum mendapatkan informasi terkait bacaleg yang sebelumnya sempat memiliki catatan hukum. Mantan terpidana belum disampaikan. Namun partai politik siap memberikan data dan berkoordinasi lebih lanjut.

"Rakor ini bagian dari proses verifikasi administrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Mei - 23 Juni 2023. Hasilnya akan disampaikan ke partai politik pada 24-25 Juni 2023," ujarnya. (Wid)

KASUS KORUPSI BAKTI KOMINFO

Gunungkidul Tak Tersasar Bantuan BTS

WONOSARI (KR) -Meskipun Kabupaten Gunungkidul termasuk salah satu wilayah sasaran bantuan program Bakti Kominfo, tetapi tidak terkait dengan bantuan Base Transceiver Station (BTS) yang sedang ramai dibahas dan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gunungkidul, Asar Janjang Riyanti mengatakan bantuan yang diberikan berupa jaringan internet dan setidaknya terdapat 24 titik lokasi pemasangan akses internet di Gunungkidul. "Untuk pemasangannya tidak meli-

menterian lain, saat itu terkait penanganan pandemi Covid-19.

Sedangkan dari Diskominfo Gunungkidul sendiri sudah beberapa kali mengajukan usulan agar ikut mendapat bantuan dari Bakti Kominfo. Namun usulan tersebut belum pernah ditanggapi dengan alasan bahwa Kabupaten Gunungkidul dianggap tidak termasuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). "Meskipun begitu, Diskominfo Gunungkidul selalu berupaya mengajukan usulan setiap ada peluang," imbuhnya.

Sementara Plt Kepala Diskominfo Gunungkidul,

Kelik Yuniantoro menambahkan bahwa di Gunungkidul sama sekali tidak dilibatkan dalam program Bakti Kominfo. Begitu pula untuk wewenang pemeliharannya. Sejauh ini, pengadaan akses internet di Gunungkidul dilakukan lewat kerjasama dengan berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk menyiasati minimnya anggaran.

Dengan adanya bantuan pihaknya tetap bersyukur untuk mengatasi masalah blank spot di sejumlah titik. "Kami hanya mendapat bantuan internet untuk mengatasi masalah blank spot," ujarnya. (Bmp)

GUNUNGKIDUL EXPO 2023

Bank BPD DIY Berikan Cash Back

WONOSARI (KR) - Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul ke-192, Bank BPD DIY turut berpartisipasi dalam menyemarakkan acara Gunungkidul Expo 2023 yang diselenggarakan di Taman Budaya Gunungkidul (TBG) dari, Jumat (26/5) sampai dengan, Selasa (30/5).

Pemimpin Bank BPD DIY Cabang Wonosari Andrianto Agus Susilo mengungkapkan, Bank BPD DIY hadir dengan mendukung transaksi non tunai pada acara tersebut melalui promo cashback 50 persen. "Promo ini diberikan kepada pengunjung yang melakukan transaksi dengan menggunakan Mobile Banking Bank BPD DIY untuk membayar pada Merchant QRIS UMKM BPD DIY peserta Gunungkidul



KR-Istimewa

BPD DIY partisipasi di Gunungkidul Expo.

Expo 2023," kata Andrianto Agus Susilo.

Diungkapkan, promo cashback tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat dalam melakukan transaksi non tunai. Pada rangkaian acara ini Bank BPD DIY berkeinginan untuk dapat membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dengan

produk-produk Bank BPD DIY seperti Mobile Banking Bank BPD DIY, QRIS Bank BPD DIY dan produk digital Bank BPD DIY lainnya. "Untuk dapat menikmati promo cashback 50 persen ini, pengunjung hanya perlu melakukan scan barcode QRIS Bank BPD DIY dengan menggunakan aplikasi Mobile Banking Bank BPD DIY," ujarnya. (Ded)

UMBY Wisuda 784 Lulusan



KR-Istimewa

Wisuda di Gedung Baru Sport Centre Kampus I UMBY.

YOGYA (KR) - Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) melaksanakan Wisuda Sarjana ke-46 dan Pascasarjana ke-21 pada Tahun Akademik 2022/2023 di Gedung Baru Sport Centre Kampus I UMBY Jalan Wates Km 10 Yogya, Sabtu (27/5).

Menurut Rektor UMBY, Dr Agus Slamet STP MP pada wisuda kali ini mampu mempersembahkan lulusan sebanyak 784 wisudawan. Terdiri atas Sarjana Strata 1 761 orang dan 23 orang

Pascasarjana Strata 2. Dengan jumlah kelulusan tersebut, maka UMBY sejak tahun berdirinya sebagai Universitas Wangsa Manggala telah mampu mempersembahkan lulusan kepada bangsa Indonesia 19.114 orang.

Lulusan tersebut merupakan salah satu perwujudan bentuk tanggung jawab UMBY sesuai dengan harapan HR Probosoetjo selaku pendiri yaitu Angudi Mulyaning Bangsa kepada bangsa dan negara Indo-

nesia.

Adapun wisudawan yang memperoleh IPK lebih dari 3,00 sebanyak 91%. Jumlah wisudawan berpredikat cumlaude atau dengan pujian sebanyak 375 orang atau 47,77%. "Kami bangga atas prestasi yang telah dicapai oleh para wisudawan dan wisudawati," tegas Agus Slamet.

Untuk penghargaan lulusan terbaik atau IPK tertinggi (Strata 1), diraih Devi Fitri Astuti dengan IPK 3,94 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Sedangkan penghargaan lulusan terbaik atau IPK tertinggi Program Pascasarjana diraih Karen Diana Savitri dengan IPK 3,93 dari Program Studi Magister Psikologi Profesi.

Rektor juga memaparkan, UMBY terus menerus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan. (Sal)

SLEMAN (KR) - Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyelenggarakan wisuda periode Mei diikuti 1.021 wisudawan di GOR UNY, Sabtu (27/5). Dalam wisuda periode ini, Rektor UNY Prof Dr Sumaryanto MKes AIFO menekankan agar seluruh lulusan UNY harus berkompetensi, adaptif dan fleksibel.

Adapun wisudawan yang harus memiliki kemampuan adaptif dan fleksibilitas di dunia kerja menurut Sumaryanto adalah para wisudawan dari program studi non-kependidikan. "Pekerja yang mempunyai kemampuan adaptif dan fleksibel cenderung akan mempunyai tingkat well being yang lebih baik," terang Sumaryanto dalam sambutannya.

Sebagai lulusan di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat ini, para wisudawan menurut Sumaryanto juga wajib memiliki kemampuan penggu-



KR-Adhitya Asros

Rektor UNY Prof Dr Sumaryanto MKes AIFO saat wisuda.

naan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi ciri dunia kerja di era digital.

"Selain itu, wisudawan juga dapat memperkuat diri dengan memiliki kompetensi lain di luar kompetensi utama, serta lebih unggul, kreatif, inovatif, dan adaptif serta berdaya saing," jelasnya.

Sedangkan bagi wisudawan yang dipersiapkan untuk menjadi calon guru, dirinya berharap agar

terang Rektor.

Oleh karenanya, Program Profesi Guru (PPG) yang UNY selenggarakan baik pra maupun dalam jabatan akan memberikan penambahan kompetensi-kompetensi sehingga wisudawan berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Selain itu, wisudawan juga dapat meningkatkan kualifikasi akademik dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam wisuda periode ini, diikuti oleh 1.021 orang dengan rincian 31 orang Program Doktor, 189 orang Program Magister, 776 orang Program Sarjana, 23 orang Program Sarjana Terapan dan 2 orang program Diploma III.

Lulusan tercepat Program Doktor dengan masa studi 2,14 tahun diraih Dr. Carles Nyoman Wali dengan IPK 3,98 dari program studi Ilmu Keolahragaan S3. (Hit)